SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

PERBUP TABALONG NO. 20, BD 2026/NO. 22, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

Abstrak : - bahwa arsip merupakan identitas, memori kolektif bangsa, dan aset berharga yang berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban nasional serta instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digital; bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh, Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun dan mengelola Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang dilaksanakan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Lembaga Kearsipan Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah dalam melaksanakan fungsi Sistem Informasi Kearsipan Daerah membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 8 Tahun 2022; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2024; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025; Perbup Tabalong Nomor 35 Tahun 2020; Perbup Tabalong Nomor 67 Tahun 2023; Perbup Tabalong Nomor 68 Tahun 2023; Perbup Tabalong Nomor 47 Tahun 2025; Perbup Tabalong Nomor 49 Tahun 2025.

- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD) di Kabupaten Tabalong yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SIKD dan JIKD. Ruang lingkup pengaturannya meliputi Sistem Kearsipan Daerah (yang terdiri atas Srikandi dan simpul jaringan aplikasi SIKN), JIKD (tugas dan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah), pembinaan dan pengendalian, pelaporan, serta pendanaan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 September 2026 dan ditetapkan pada tanggal 8 September 2026.